

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019**

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan realisasi anggaran Tahun 2018	Informasi tentang realisasi penyerapan anggaran APBD dan APBN	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy di Buku Laporan Keuangan	5 Tahun
2	Ringkasan aset dan investasi	Informasi tentang daftar aset yang dikuasai oleh SKPD Dinas Kesehatan Prov Jatim meliputi aset bergerak dan tidak bergerak	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Soft Copy	
3	Neraca 2018	Ikhtisar/Penjelasan mengenai neraca laporan keuangan Tahun 2013,2014,2015,2016,2017	Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy	
4	Catatan atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2018	Ikhtisar/Penjelasan mengenai neraca laporan keuangan Tahun 2013, 2014,2015,2016,2017	Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy	
5	Laporan Realisasi Anggaran 2018	Informasi tentang posisi laporan keuangan SKPD yang menunjukkan aset, kewajiban dan ekuitas	Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy	
6	RENSTRA 2015-2019	Informasi tentang alamat kantor dinas kesehatan Prov Jatim, Ruang lingkup Kegiatan, Visi dan misi, tujuan, sasaran, Strategi & kebijakan, Tugas & fungsi, Struktur Organisasi	Seksi Penyusunan Program dan Anggaran, Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	4 Tahun sekali atau setiap ada perubahan struktur organisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hard copy & soft copy	15Tahun
7	Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2017	Gambaran situasi kesehatan di Provinsi Jawa Timur yang berisi derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan serta informasi lainnya yang menggambarkan kinerja sektor kesehatan di 38 Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Petunjuk teknis penyusunan Profil Kesehatan dibuat oleh Pusat Data dan Informasi	Pengelola Program	Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Prov Jatim	1 Tahun sekali di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy	5 Tahun
8	Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019	Informasi tentang rekapitulasi nama program dan/atau kegiatan, jumlah anggaran, sumbernya, target capaian, penanggungjawab dan jadwal pelaksanaan	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1 Tahun sekali, Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
9	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015, 2016, 2017, 2018	Laporan Pertanggungjawaban kepada stakeholder untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara pertanggungjawabannya kepada	Tim pengelola SAKIP berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Februari, tahun+1 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy	5 Tahun
10	Ringkasan LKPJ (laporan Kerja Pertanggungjawaban) 2018	Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh	Tim Manajemen Data Kesehatan	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Januari, Tahun+1, di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy	5 Tahun
11	Ringkasan Laporan Tahunan 2017	Laporan berkala setiap tahun yang berisi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perkembangan dan hasil yang dicapai oleh setiap unit kerja yang	Pengelola Program	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Juni, 1 Tahun sekali di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy	5 Tahun

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKGP3) / Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)2018	Laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja program yang dibuat setiap triwulan.	Tim Manajemen Data Kesehatan	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan 3 bulan sekali di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy & Soft Copy	5 Tahun
13	Laporan permohonan Informasi	Informasi tentang Jumlah Permintaan informasi; Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi; Jumlah permintaan informasi	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	6 Bulan, Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun
14	Daftar Informasi Publik	Informasi yang dikuasai oleh PPID Pembantu Dinkes Prov Jatim	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1 Tahun, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun
15	SOP Permohonan Informasi	Informasi tentang prosedur permohonan informasi secara langsung dan tidak langsung	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Soft Copy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
16	SOP Pelayanan Keberatan	Informasi tentang prosedur permohonan keberatan secara langsung dan tidak langsung	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
17	SOP Permohonan pengaduan	Informasi tentang prosedur pengajuan pengaduan	Sub Bag Tata Usaha	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
18	SOP Penanganan Pengaduan	Informasi tentang tata cara memberikan layanan pengaduan	Sub Bag Tata Usaha	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
19	Daftar kewenangan penanganan pangaduan	Informasi tentang batasan kewenangan pengaduan yang dilayani atau tidak	Sub Bag Tata Usaha	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
20	Tata cara dan syarat usulan kenaikan pangkat	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan kenaikan pangkat reguler, fungsional, struktural dan penyesuaian ijazah	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
21	Tata cara dan syarat usulan kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan kenaikan jenjang jabatan bagi JFT kesehatan	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
22	Tata cara dan syarat usulan tugas belajar dan ijin belajar	Informasi mengenai tata cara dan syarat usulan tugas belajar dan ijin belajar serta surat keterangan ijin belajar	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
23	Tata cara dan syarat usulan pensiun dan Layanan Klaim Otomatis ke Taspen	Informasi mengenai tata cara dan syarat usulan pensiun bagi pensiun BUP, janda/duda, dan pensiun atas permintaan sendiri	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
24	Tata cara dan syarat usulan Satyalencana	Informasi mengenai tata cara dan syarat usulan Satyalencana bagi PNS yang sudah memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
25	Tata cara dan syarat usulan Kenaikan Gaji Berkala	Informasi mengenai tata cara dan syarat usulan kenaikan gaji berkala	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
26	Daftar kelompok budaya kerja Dinas dan UPT	Nama, judul, dan uraian risalah kelompok budaya kerja yang dibentuk di Dinas Kesehatan Prov Jatim dan UPT	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
27	Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS	Mengatur tentang ketentuan Disiplin PNS beserta jenis hukumannya	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS	Mengatur tentang ketentuan ketentuan pelaksanaan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
29	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Mengatur tentang SOTK Dinkes Jatim	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
30	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56/2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	mengatur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
31	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Mengatur tentang Manajemen Kinerja Pegawai terkait dengan pemberian TPP Prestasi Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	
32	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2019	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov Jatim	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Setiap ada proses pengadaan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy di papan pengumuman Dinas Kesehatan Prov Jatim dan situs resmi http://dinkesjatimprov.go.id	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
33	Ringkasan Laporan Pengadaan Barang & Jasa tahun 2018	Informasi tentang nama pengadaan dan penyedia jasanya	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Soft Copy	
34	Daftar Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Informasi berisi data tenaga kesehatan yang berada di Dinkes dan UPT	Seksi P3SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kabid PSDK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
35	Daftar Tenaga Bidan, dokter/dokter gigi PTT di Provinsi Jawa Timur	Informasi tentang formasi tenaga bidan PTT Pusat, Dokter/Dokter Gigi PTT Pusat yang berada di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur	Sub Bag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy	
36	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	Informasi tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) program/kegiatan yang dilakukan dari semua Subag/Seksi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari nama-nama beserta	Sub Bag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy dan hardcopy	
37	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)	UKS adalah bagian dari kegiatan PKPR diluar gedung Puskesmas, yg memiliki 3 pilar disebut TRIAS UKS, Yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat	KASI KGM	SEKSI KGM	DINAS KESEHATAN PROV JATIM	FOTO DAN VIDIO	2 TAHUN
38	Profil Promkes	Data laporan kegiatan promkes provinsi jawa timur	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	Tahunan	Softcopy	2 TAHUN
39	Buku UBKM	Indikator/ceklist tingkat perkembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2016	Softcopy dan Hardcopy	
40	Buku juknis desa/kelurahan siaga aktif	Pedoman pengembangan desa/kelurahan siaga di daerah	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2015	Softcopy dan Hardcopy	
41	Buku juknis taman posyandu	Pedoman pengembangan taman posyandu	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2015	Softcopy dan Hardcopy	
42	Buku pedoman pengembangan poskestren	Pedoman pengembangan pos kesehatan pondok pesantren	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2016	Softcopy dan Hardcopy	
43	Buku saku TB Kusta HIV	Informasi dasar tentang pencegahan penyakit TB Kusta HIV	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2016	Softcopy dan Hardcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Buku Emodemo di Posyandu	Teknik yang akan digunakan kader dalam memberikan pemahaman yang mendasar kepada sasaran taman posyandu dengan melibatkan emosional sasaran dan dipraktekkan melalui demonstrasi guna mengubah perilaku kesehatan masyarakat terutama sasaran taman posyandu	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2017	Softcopy dan Hardcopy	
45	Buku Saku Prioritas dana desa untuk kesehatan	Pengertian dan Tujuan Dana Desa, Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa, Menu Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Kesehatan Permendesa No 19 Tahun 2017	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2018	Softcopy dan Hardcopy	
46	Buku saku kader pendampingan ibu hamil untuk mencegah stunting pada bayi dan balita	Langkah-langkah kegiatan pendampingan, tugas kader mendampingi ibu hamil dari masa kehamilan, persalinan, setelah melahirkan sampai masa nifas	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2019	Softcopy	
47	Buku saku tugas pendamping di taman posyandu	Tugas pendamping, form penilaian dan evaluasi taman posyandu	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2014	Softcopy	
48	Buku saku tugas pendamping poskestren	langkah-langkah kegiatan pendampingan, meningkatkan kualitas poskestren, tugas pendamping dalam membentuk poskestren	Kepala Seksi Promkes	Kepala Seksi Promkes	2019	Softcopy	
49	KAB/ KOTA SEHAT	Kota Sehat adalah program yang bertujuan menciptakan tempat hidup yang nyaman, aman, bersih dan sehat bagi warganya untuk bertempat tinggal dan bekerja. Kegiatan ini dapat dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.	BAPPEDA : BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKATAN	DINAS KESEHATAN : SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN		Softcopy	1 tahun
		Tim Pembina Kota Sehat Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan kepada Kab./Kota yang akan mengikuti verifikasi nasional dengan berbagai kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi. Dan mulai tahun 2010 melakukan verifikasi Kota Sehat tingkat Provinsi. Verifikasi Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk menyiapkan Kab./Kota yang akan mengikuti verifikasi Nasional pada tahun berikutnya, sekaligus sebagai dasar Gubernur mengusulkan Kab./Kota untuk mengikuti verifikasi Kota Sehat tingkat Nasional	DINAS KESEHATAN : SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN	DINAS KESEHATAN : SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN			

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
		Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur intensif melakukan pembinaan Kota Sehat maka pertambahan Kabupaten/Kota Sehat di Jawa Timur bertambah sangat signifikan sehingga sampai tahun 2017 sudah ada 35 Kabupaten/Kota yang sudah mengadopsi Kab/Kota sehat. Pada tahun 2015 Jawa Timur mendapat penghargaan nasional sebagai Tim Pembina Provinsi terbaik untuk program Kab/Kota Sehat yang diterima oleh Gubernur Jatim.					
50	Pengukuran Kebugaran dan Latihan fisik Calon Jamaah haji	Pengukuran Kebugaran dan Latihan fisik					
51	STBM	<p>Website www.stbm.kemkes.go.id</p> <p>STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat melalui metode pemucuan. indikator outcome stbm adalah menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Sedangkan indikator output stbm adalah :</p>	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur – Seksi Kesling Kesjaor (login	Kementerian Kesehatan	2018	website	
		<p>a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar sembarang tempat (ODF)</p> <p>b. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas tersedia fasilitas cuci tangan, sehingga semua orang dapat mencuci tangan dengan benar.</p> <p>c. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman.</p> <p>d. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.</p> <p>Untuk mencapai outcome tersebut STBM memiliki 3 strategi nasional seperti yang tertuang di Permenkes No 3 tahun 2014 yaitu :</p> <p>1. Penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment)</p> <p>2. Peningkatan kebutuhan sanitasi (demand creation)</p>		Sekretariat@stbm.kemkes.go.id			

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (supply improvement)</p> <p>Apabila salah satu komponen tidak adakana proses pencapaian 5 Pilar STBM tidak maksimal.</p> <p>Website stbm berisi : referensi & panduan, inovasi dan TTG, info terbaru, info sekretariat, stbm smart dan monev</p> <p>Untuk dapat menggunakan sistem monev stbm melalui website stbm pilih menu monev. Menu ini akan menampilkan seluruh data stbm / akses sanitasi sampai ke tingkat desa, namun hanya dapat melihat saja. Untuk dapat melakukan pengisian data, edit data maka kabupaten/kota harus masuk menu login dan memasukkan username dan password.</p>					
52	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/PER/III/ 2010 tentang Pengendalian Vektor	Berisi tentang pengaturan penyelenggaraan, perizinan, pembiayaan, peran serta masyarakat, monev serta pembinaan dan pengawasan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Maret 2010	<i>Softcopy</i>	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
53	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan	Berisi tentang penetapan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penetapan dan pencabutan penetapan daerah KLB/wabah, tata cara penanggulangan dan tata cara pelaporan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 12 Oktober 2010	<i>Softcopy</i>	
54	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV / AIDS	Berisi tentang penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2013	<i>Softcopy</i>	
55	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak	Berisi tentang acuan tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi dan pemangku kepentingan terkait pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2013	<i>Softcopy</i>	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV	Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV wajib menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi yang menjadi konselor HIV, pengelola/ pengurus tempat kerja, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Oktober 2014	Softcopy	
57	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Berisi tentang penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular, penyelenggaraan, sumber daya kesehatan, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Oktober 2015	Softcopy	
58	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral	Pengobatan ARV merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 11 November 2014	Softcopy	
59	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus	Berisi tentang penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus (upaya promkes, deteksi dini, surveilans, penanganan/p'obatan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 15 Juli 2015	Softcopy	
60	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis	Berisi tentang upaya penanggulangan tuberculosis (promkes, surveilans TB, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 22 Desember 2016	Softcopy	
61	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia	Berisi tentang upaya intensifikasi kegiatan Penanggulangan Frambusia	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 25 Januari 2017	Softcopy	
62	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis dari Ibu ke Anak	Berisi tentang upaya eliminasi PPIA (penetapan dan pelaksanaan strategi Eliminasi Penularan, penetapan dan pelaksanaan peta jalan dan intensifikasi kegiatan Eliminasi Penularan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 13 November 2017	Softcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 15 Januari 2019	Softcopy	
64	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur	Berisi tentang karakteristik dan cara penularan DBD, upaya pengendalian, pencegahan, surveilans, pengasapan, larvasidasi, penanganan penderita, KLB DBD, pokjanal, PSM dan pelaporan pembinaan pengawasan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya, 22 November 2011	Softcopy	
65	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya, 28 Desember 2018	Softcopy	
66	Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	Ada 8 kab/ko yang sudah mempunyai SK G1R1J sebagai bentuk implementasi G1R1J	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Kab/Kota	Softcopy	
67	Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)	Prevalensi kasus HIV, IMS, pada beberapa kelompok kunci	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Softcopy	
68	Waspada Penyakit HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit HIV AIDS dan IMS	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
69	Waspada Penyakit KUSTA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Kusta	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
70	Waspada Penyakit TB	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit TB	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
71	Waspada Penyakit DEMAM BERDARAH	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Demam Berdarah	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
72	Waspada Penyakit ISPA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit ISPA	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
73	Waspada Penyakit DIARE	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Tata Laksana Diare dan Cara Pencegahan Penyakit Diare	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Waspada Penyakit TYPHOID	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Typhoid	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
75	Waspada Penyakit HEPATITIS	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Hepatitis (A, B dan C)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
76	Waspada Penyakit MALARIA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Malaria	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
77	Waspada Penyakit LEPTOSPIROSIS	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Malaria	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
78	POSBINDU PTM	Posbindu PTM adalah kegiatan pengendalian faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat. Program Posbindu PTM ditujukan kepada seluruh masyarakat sehat dan berisiko yang berusia dari 15 tahun ke atas. Posbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan sekali, bila diperlukan dapat lebih dari satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Posbindu PTM diperlukan untuk dapat mengendalikan faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang terdapat pada setiap individu agar tidak berkembang menjadi Penyakit Tidak Menular.	Dinas Kesehatan Provinsi Bidang P2P Seksi P2PTM dan Keswa	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim		Softcopy	1 tahun
79	Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Penyakit Menular dan Keracunan Pangan	Informasi tentang Program Pengendalian KLB Penyakit menular dan Keracunan Pangan serta langkah-langkah PE dan Penanggulangan KLB	Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy	
80	KLB Difteri	Informasi tentang Pengertian, Gejala, cara penularan, Dampak/akibat, Daerah persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan cara pencegahan penyakit Difteri	Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
81	KLB Demam Zika	Informasi tentang Pengertian, Gejala, cara penularan, Dampak/akibat, Daerah persebaran, Jumlah penderita di tiap Kab/kota serta Upaya yang telah dilakukan dan cara pencegahan penyakit yang disebabkan virus Zika	Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
82	KLB Lepstirosis	Informasi tentang Pengertian, Gejala, cara penularan, Dampak/akibat, Daerah persebaran, Jumlah penderita di tiap Kab/kota serta Upaya yang telah dilakukan dan cara pencegahan penyakit Lepstirosis	Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
83	Waspada Penyakit DIFTERI	Informasi tentang Pengertian, Gejala, cara penularan, Dampak/akibat, Daerah persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan cara pencegahan penyakit Difteri	Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
84	Waspada Penyakit Mers Co-V	Informasi tentang pengertian, gejala, cara penularan, dampak/akibat, daerah persebaran, upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyakit Mers Co-V	Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
85	Waspada Penyakit Ebola	Informasi tentang Pengertian, Gejala, cara penularan, Dampak/akibat, Daerah persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan cara pencegahan penyakit Ebola	Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	
86	Kepesertaan JKN penduduk Jawa Timur Tahun 2018	Informasi ini menggambarkan cakupan kepesertaan penduduk Jawa Timur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) dari setiap jenis kepesertaan PBI / Non PBI per Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, BPJS Kesehatan Kedeputan wilayah Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tribulanan (per tiga bulanan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell	Satu tahun
87	Status Akreditasi Puskesmas di Jawa Timur	Informasi ini menggambarkan hasil pelaksanaan survei akreditasi puskesmas yang ada di provinsi Jawa Timur dan status akreditasinya, dasar, madya, utama dan paripurna.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,	Semesteran (per enam bulan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell	Tiga tahun
88	Hasil Kunjungan Rumah PIS - PK di Jawa Timur	Informasi ini menggambarkan hasil kunjungan rumah PIS - PK di Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang diambil dari dashboard aplikasi KS Kementerian Kesehatan RI	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,	Tribulanan (per tiga bulanan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell	Enam bulan
89	Daftar PCM Jatim	Nomor Telepon Keadaan Darurat	PKR	PKR	setiap saat	Softcopy	2 Tahun
90	Daftar RS Jatim	Nama, alamat, kontak, Kelas, Jumlah TT	PKR	PKR	setiap saat	Softcopy	2 Tahun

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Daftar EMT Jatim	Instansi/Lembaga Pengirim Tim Medis	PKR	PKR	setiap saat	Softcopy	2 Tahun
92	Daftar RS Pendidikan Jatim	Nama, alamat	PKR	PKR	setiap saat	Softcopy	2 Tahun
93	Daftar RS MOU BPJS Kesehatan	Nama, alamat	PKR	PKR	setiap saat	Softcopy	2 Tahun
94	Daftar RS Mou Pelayanan Miskin	Nama, alamat	PKR	PKR	setiap saat	Softcopy	2 Tahun
95	Daftar RS Integrasi Batra	Nama, alamat	PKR	PKR	setiap saat	Softcopy	2 Tahun
96	Rekognisi Pembelajaran Lampau	Program percepatan pendidikan adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan melalui RPL dari jenjang pendidikan menengah (JPM) dan Diploma I ke Diploma III sedangkan RPL sendiri definisinya adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.	Bidang SDK Seksi SDM	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan PPSDM Kesehatan 2. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Softcopy/Hardcopy	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
97	Tugas Belajar	Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lingkungan Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD-nya maka Kementerian Kesehatan melaksanakan penerimaan peserta tugas belajar dalam negeri SDM Kesehatan. Alokasi Dana Bantuan Tugas Belajar tahun 2019 disediakan untuk jenjang pendidikan D-IV, S-1, S-1 Profesi, S-2, S-2 <i>Double Degree</i>	Bidang SDK Seksi SDM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Surat Edaran Nomor DM.02.03/V/0645/2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Program <i>Double Degree</i> Universitas Hasanuddin – <i>Griffith University</i> Tahun 2019 3. Surat Edaran Nomor DM.0203/V/0102/2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019	Januari 2019	Softcopy/Hardcopy	
98	PPDS	Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan medis spesialisik dan sub spesialisik ,	Bidang SDK Seksi SDM	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan PPSDM		Softcopy/Hardcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kemenkes melalui Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan pendidikan Dokter spesialis / pendidikan Dokter gigi spesialis melaksanakan penerimaan peserta program Bantuan Pendidikan Dokter spesialis / pendidikan Dokter gigi spesialis		Kesehatan			
99	WKDS	Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis, Pemerintah Pusat melakukan penempatan	Bidang SDK Seksi SDM	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	1. Jakarta, 2017	Softcopy/Hardcopy	
		dokter spesialis selama 1 tahun sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari 4 Spesialis Dasar dan 1 Spesialis Anestesi sebagai pelayanan penunjang.		2. PP NO. 4 Th 2017	2. Jakarta, 12 Januari 2017		
				3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	3. Surabaya, 21 Agustus 2017		
100	Program Dokter Internsip	Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyalarsan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan	Bidang SDK Seksi SDM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 299/Menkes/Per/II/2010 tentang penyelenggaraan Program Internship dan Penempatan Dokter Pasca Internsip	1. Jakarta 2010	Softcopy/Hardcopy	
101	Tenaga Kesehatan Teladan	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan diusukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota berasal dari puskesmas yang telah terakreditasi minimal akreditasi madya meliputi 9 kategori yaitu : Dokter, Dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, nutrisiois, ahli teknis laboratorium medik, kefarmasian	Bidang SDK Seksi SDM	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya, 14 Desember 2018	Softcopy/Hardcopy	
102	Inpassing	Proses Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu	Bidang SDK Seksi SDM	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 /2016	1. Jakarta, 2016	Softcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan tentang Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/ Inpassing</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 42 Tahun 2018 tentang Penata Anestesi</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 443 tahun 2018 tentang Asisten Penata Anestesi</p>	<p>2. Jakarta 2017</p> <p>3. Jakarta, 2018</p>		
103	Uji Kompetensi	Dalam upaya memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional maka perlu ada uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat kenaikan jenjang sementara ini bagi jabatan tertentu yaitu Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Perekam medis, Teknisi Elektromedis, Pembimbing Kesehatan Kerja.	Bidang SDK Seksi SDM	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Jakarta, 2017	Softcopy/Hardcopy	
104	Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional	Penetapan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang merupakan syarat untuk kenaikan jabatan fungsional sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	Bidang SDK Seksi SDM	<p>1. Keputusan Menteri Kesehatan No 153 tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan</p> <p>2. SOP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p>	Jakarta, 2015	Softcopy dan Hardcopy	
105	Surat Tanda Registrasi (STR)	<p>Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dapat dilakukan secara <i>online</i> dan dapat diperpanjang setiap tahun. Yang akan datang Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan menjadi Tugas dan Fungsi Sekretariat KTKI.</p> <p>alamat aplikasi dulu : mtki.kemkes.go.id sekarang : ktki.kemkes.go.id</p>	Bidang SDK Seksi SDM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Struktur dan Tata Kerja KTKI	Jakarta, 2017	Softcopy dan Hardcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Izin sarana produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) , dasar hukum:	Aplikasi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK).	Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Kasi Alkes dan PKRT		Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://sertifikasialkes.ke.mkes.go.id/	
107		Aplikasi Registrasi Alat Kesehatan dan PKRT Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK) juga untuk Izin Edar Produk Alat Kesehatan dan PKRT				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://regalkes.depkes.go.id/	
108		Sistem informasi berbasis web untuk mengetahui perijinan yang sudah terbit melalui Sistem Registrasi Online yang disebut sebagai Sistem e-Infoalkes, Pengguna portal e-Infoalkes ini adalah Kementerian Kesehatan, Perusahaan Produsen serta Penyalur ALKES & PKRT dan masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai perijinan ALKES dan PKRT yang sudah diterbitkan serta mengetahui profil perusahaan yang bergerak di bidang ALKES dan PKRT				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://infoalkes.depkes.go.id/	
109		Aplikasi pelaporan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT) ke Kementerian Kesehatan RI				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://e-watch.alkes.kemkes.go.id/	
110		Aplikasi e-Report Alat Kesehatan dan PKRT ini dibangun untuk memfasilitasi pelaporan hasil produksi dan penyaluran Alat Kesehatan oleh Produsen atau Penyalur Alat Kesehatan, serta pelaporan hasil produksi atau impor Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) oleh produsen atau importir PKRT.				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://e-report.alkes.kemkes.go.id	
111		Aplikasi ini merupakan rekapitulasi peredaran Alat Kesehatan dan PKRT di dalam / luar negeri serta diharapkan mampu telusur apabila terjadi komplain terhadap penggunaan alat kesehatan dan atau PKRT				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://e-report.alkes.kemkes.go.id	
112		Pelayanan Perijinan Terpadu P2T (memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan)				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://www.p2t.jatimprov.go.id/	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
113		Sistem surat keterangan dibangun dengan memperhatikan keberagaman teknologi yang ada, keberagaman kemampuan pengguna, keberagaman infrastruktur yang tersedia. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan ketersediaan software dan hardware dalam melaksanakan kegiatan layanan e-Sistem Surat Keterangan Alat Kesehatan yang menyatukan 10 jenis Surat Keterangan dengan CFS (Certificate Of Free Sale), COE (Certificate of Export) dan HC (Health Certificate)				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://esuka.binfar.kemkes.go.id/portal	
114		Kebutuhan pengguna dari aplikasi e-Sistem Surat Keterangan Alat Kesehatan akan dikembangkan untuk mendapatkan masukan secara langsung dari pengguna sistem dan kebutuhan sistem di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi ini nantinya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dunia usaha.				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://esuka.binfar.kemkes.go.id/portal	
115	Dasar Hukum :						
	1. Permenkes RI nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010	Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga					
	2. Permenkes RI nomor Nomor 62 Tahun 2017	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga					
	3. Permenkes RI nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010	Penyaluran Alat Kesehatan Tangga.					
	4. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan					
	5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 137 Tahun 2016	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu					
116	Izin Pedagang Besar Farmasi	Pengertian, jenis pedagang besar farmasi, tatacara, persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan izin PBF. Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
		2. Permenkes RI nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang 3. Permenkes RI nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang besar farmasi besar farmasi					

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan					
117	Izin Obat Tradisional	Pengertian obat tradisional, ketentuan, tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin obat tradisional. Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor : 006 tahun 2012 tentang : Industri dan Usaha Obat Tradisional; 2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)	
118	Registrasi Obat Tradisional (Izin Edar)	Pengertian registrasi, Ketentuan, tatacara dan persyaratannya untuk mendapatkan izin edar. Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor 007 tahun 2012 tentang : registrasi obat tradisional 2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku)	
		3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.				Softcopy	
119	Izin Produksi Kosmetika	Pengertian kosmetika, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin produksi kosmetika. Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi Kosmetika; 2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)	
120	Izin Edar (Notifikasi) Produksi Kosmetika	Pengertian kosmetika, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin edar atau notifikasi. Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor: 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika; 2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku)	
121	Izin Industri Farmasi	Pengertian Industri Farmasi, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin Industri.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI nomor : 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi; 2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan 					
122	Pelayanan Kefarmasian	<p>Pelayanan Kefarmasian di Apotek: Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP;</p> <p>Pelayanan Farmasi Klinik; Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 2. Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek. </p> <p>Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas : Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP;</p> <p>Pelayanan Farmasi Klinik; Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. </p> <p>Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit: Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP;</p> <p>Pelayanan Farmasi Klinik; Dasar hukum : Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy	
123	Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan	<p>Informasi yang diberikan : Penyelenggaraan metode CBIA; Penggunaan Obat Rasional meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggolongan obat; b. Informasi pada kemasan dan brosur obat; c. Cara pemilihan dan mendapatkan obat; d. Bentuk sediaan; e. Peringatan perhatian; f. Dosis obat; g. Cara penggunaan obat; h. Efek samping obat; i. Cara penyimpanan obat; j. Obat rusak dan kadaluarsa; k. Cara pembuangan obat. 	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tata cara pelaksanaan metode CIBIA (tujuan dan tahapan kegiatan) Dasar hukum : Kepmenkes RI nomor : HK.02.02/MENKES/427/2015 tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat					
124	Pelayanan Informasi Keracunan	Informasi tentang tata laksana keracunan (pencegahan dan pertolongan pertama)	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku)	
125	Makanan dan Minuman	Informasi yang diberikan meliputi : Peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan makanan dan minuman; Jenis pangan yang diizinkan untuk PIRT Jenis Bahan Tambahan Pangan (BTP); Bahan yang dilarang ditambahkan pada makanan; Label kemasan; Dasar hukum : 1. UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 2. PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 3. PP nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 4. Permenkes RI noomor 033 tahun 2012 : Bahan Tambahan Pangan	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy	
126	Obat Tradisional	Informasi yang diberikan meliputi : Bahaya bahan kimia obat (BKO) yang ditambahkan pada sediaan obat tradisional; Jenis bahan kimia obat (BKO) yang sering ditambahkan pada obat tradisional; Hal-hal yang dilarang dalam pembuatan obat tradisional. Dasar hukum : Permenkes RI nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy	
127	Kosmetika	Informasi yang diberikan meliputi : Jenis kosmetika yang termasuk golongan A dan golongan B Bahaya bahan kimia yang dilarang ditambahkan kosmetika. Dasar hukum : Permenkes RI nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy	
128	Obat Publik	Informasi yang diberikan meliputi : 1. Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi Jawa Timur; 2. Rantai manajemen pengelolaan sediaan farmasi mulai dari bahan baku sampai dengan penggunaan sediaan farmasi oleh pasien.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy (buku)	

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU MASA RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
129	NAPZA	<p>Informasi yang diberikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi; 2. Penggolongan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi <p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi; 3. Permenkes RI nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika; 4. Permenkes RI nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; 	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Kasi Kefarmasian		Softcopy dan hardcopy	
130	E-Report	<p>Informasi yang diberikan meliputi :</p> <p>Tata cara dan alur pelaporan obat setiap triwulan di sarana PBF;</p> <p>Tata cara dan alur pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi setiap bulan di sarana PBF.</p> <p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; 2. Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. 	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Kasi Kefarmasian		Softcopy	1 Tahun
131	SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika)	<p>Informasi yang diberikan adalah tata cara dan alur pelaporan narkotika dan psikotropika setiap bulan di sarana pelayanan.</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian		Softcopy	1 Tahun